



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3459191 www.kominfo.go.id

Nomor : B-50/DJIKP/IK.01.02/01/2023

Jakarta, 20 Januari 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Dukungan Publikasi
Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Kepada Yth.

1. Asdep/Kepala Pusat/Kepala Biro Humas Kementerian/Lembaga
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Seluruh Indonesia
(sesuai daftar terlampir)
di tempat

Pada tahun 2023, Indonesia memegang kembali keketuaan ASEAN. Presiden Joko Widodo telah menerima estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja untuk menjadi Ketua ASEAN di tahun 2023 pada 13 November 2022 lalu. Tema ASEAN pada tahun 2023 ini adalah "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan dan kerjasama dari Saudara untuk turut serta berpartisipasi dalam mempublikasikan Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 secara luas baik melalui videotron, media cetak, media elektronik, media sosial, media luar ruang, maupun media lain yang dikelola instansi Saudara. Adapun materi publikasi dan bukti penayangannya dapat diunduh dan dilaporkan (dengan mengunggah bukti tayang) melalui tautan <https://komin.fo/3bUUL>.

Informasi dan komunikasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Astrid (0857-4235-0253). Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Gubernur, Bupati, Walikota di seluruh Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo.

Lampiran : Permohonan Dukungan Publikasi
Keketuaan Indonesia di ASEAN
2023

Nomor : B-50/DJKP.2/IK.01.02/01/2023

Tanggal : 20 Januari 2023

Daftar Instansi

I. Kementerian dan Lembaga

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Kementerian Sekretariat Negara
6. Kementerian Dalam Negeri
7. Kementerian Luar Negeri
8. Kementerian Pertahanan
9. Kementerian Agama
10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. Kementerian Keuangan
12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
13. Kementerian Kesehatan
14. Kementerian Sosial
15. Kementerian Ketenagakerjaan
16. Kementerian Perindustrian
17. Kementerian Perdagangan
18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Perhubungan
20. Kementerian Komunikasi dan Informatika
21. Kementerian Pertanian
22. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
23. Kementerian Kelautan dan Perikanan
24. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
25. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
26. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional I Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
27. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
28. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
30. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
31. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

32. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
33. Kementerian Pemuda dan Olahraga.
34. Sekretariat Jenderal MPR RI
35. Sekretariat Jenderal DPR RI
36. Sekretariat Jenderal DPD RI
37. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
38. Mahkamah Agung (MA)
39. Mahkamah Konstitusi (MK)
40. Komisi Yudisial (KY)
41. Sekretariat Kabinet
42. Sekretariat Wakil Presiden
43. Kejaksaan Agung
44. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
45. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
46. Komisi Pemberantasan Korupsi
47. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
48. Ombudsman RI
49. Badan Riset dan Inovasi Nasional
50. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
51. Kepolisian Republik Indonesia
52. Tentara Nasional Indonesia
53. Lembaga Ketahanan Nasional
54. Badan Intelijen Negara (BIN)
55. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
56. Badan Pusat Statistik (BPS)
57. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
58. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
59. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
60. Badan Nasional Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
61. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
62. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
63. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
64. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
65. Dewan Pertimbangan Presiden
66. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
67. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
68. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (WANTANAS)
69. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
70. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
71. Perpustakaan Nasional
72. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
73. Lembaga Administrasi Negara (LAN)

74. Badan Narkotika Nasional (BNN)
75. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
76. Dewan Kelautan Indonesia
77. Badan Informasi Geospasial (BIG)
78. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
79. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
80. Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
81. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI
82. Badan Amil Zakat Nasional
83. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

II. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi:

1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Selatan
4. Sumatera Barat
5. Bengkulu
6. Riau
7. Kepulauan Riau
8. Jambi
9. Lampung
10. Bangka Belitung
11. Kalimantan Barat
12. Kalimantan Timur
13. Kalimantan Selatan
14. Kalimantan Tengah
15. Kalimantan Utara
16. Banten
17. DKI Jakarta
18. Jawa Barat
19. Jawa Tengah
20. Daerah Istimewa Yogyakarta
21. Jawa Timur
22. Bali
23. Nusa Tenggara Timur
24. Nusa Tenggara Barat
25. Gorontalo
26. Sulawesi Barat
27. Sulawesi Tengah
28. Sulawesi Utara
29. Sulawesi Tenggara

30. Sulawesi Selatan
31. Maluku Utara
32. Maluku
33. Papua Barat
34. Papua
35. Papua Tengah
36. Papua Pegunungan
37. Papua Selatan
38. Papua Barat Daya